



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN

2025 LAPORAN KEUANGAN AUDITED



**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun PPMHKP Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kantor Stasiun PPMHKP Jambi Audited 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PPMHKP Jambi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Jambi 04 Mei 2026

Kepala Stasiun KIPM Jambi,

Pryan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Ringkasan Laporan Keuangan	1
1. Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Neraca	1
3. Laporan Operasional	1
4. Laporan Perubahan Ekuitas	2
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
1.1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran	3
1.2 Rincian Neraca	4
1.3 Rincian Laporan Operasional	5
1.4 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	6
A. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Jambi	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	9
A.5 Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1 Pendapatan	19
B.2 Belanja	19
B.3 Belanja Pegawai	20
B.4 Belanja Barang	21
B.5 Belanja Modal	21
B.5.1 Belanja Modal Tanah	22

B.5.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	22
B.5.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	23
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	23
B.5.5 Belanja Modal Lainnya	23
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	24
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	24
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	24
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	24
C.4 Piutang PNBPN	25
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	25
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	25
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar	26
C.8 Belanja Dibayar di Muka	26
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	27
C.10 Persediaan	27
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	28
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran	28
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	28
C.14 Tanah	29
C.15 Peralatan dan Mesin	30
C.16 Gedung dan Bangunan	30
C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31
C.18 Aset Tetap Lainnya	32
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	33
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
C.21 Aset Tak Berwujud	33
C.22 Aset Lain-Lain	34
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	35
C.24 Uang Muka dari KPPN	35

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.26 Utang Yang Belum ditagihkan	36
C.27 Pendapatan Diterima di Muka	36
C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar	36
C.29 Ekuitas	36
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
D.2 Beban Pegawai	37
D.3 Beban Persediaan	38
D.4 Beban Barang Dan Jasa	39
D.5 Beban Pemeliharaan	39
D.6 Beban Perjalanan Dinas	40
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	40
D.8 Beban Bantuan Sosial	40
D.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	41
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	41
D.12 Kegiatan Non Operasional	42
D.13 Pos Luar Biasa	42
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
E.1 Ekuitas Awal	43
E.2 Surplus (Defisit) LO	43
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	44
E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	44
E.3.6 Koreksi Lain-Lain	44
E.4 Transaksi Antar Entitas	45
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (Ddel)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (Dkel)	45
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	45
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung Dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	46
E.5 Ekuitas Akhir	46

F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	47
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	47
F.2 Pengungkapan Lain-Lain	48

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Stasiun PPMHKP Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Jambi 04 Mei 2026

Kepala Stasiun KIPM Jambi,

Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, MH

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi Audited 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Per 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada periode Per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.865.500 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.800.000.

Realisasi Belanja Negara pada periode Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.500.970.612 atau mencapai 95,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.695.437.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Per 31 Desember 2025. Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dicatat sebesar Rp3.040.763.811 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp112.368.114; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.928.395.697 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp10.922.881 dan Rp3.040.763.811.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.844.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.550.710.806 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.561.633.687. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp64.670.194 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4. 600.459.881.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp3.137.558.185 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.600.459.881 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.625.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.494.367.626 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.029.840.930.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2025		% thd Angg	Per 31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1,800,000	27,865,500	1548.08	11,318,253
JUMLAH PENDAPATAN		1,800,000	27,865,500	1548.08	11,318,253
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2,841,089,000	2,819,199,712	99.23	2,579,751,300
Belanja Barang	B.4	1,854,348,000	1,681,770,900	90.69	2,269,409,936
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		4,695,437,000	4,500,970,612	95.86	4,849,161,236

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan G	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	112,368,114	30,613,661
Jumlah Aset Lancar		112,368,114	30,613,661
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	18,000,000	18,000,000
Peralatan dan Mesin	C.15	5,598,496,657	6,182,780,538
Gedung dan Bangunan	C.16	3,137,524,432	3,137,524,432
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	378,093,000	387,293,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	19,850,000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(6,203,718,392)	(6,608,095,274)
Jumlah Aset Tetap		2,928,395,697	3,137,352,696
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3,040,763,811	3,167,966,357
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	10,922,881	30,408,172
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10,922,881	30,408,172
JUMLAH KEWAJIBAN		10,922,881	30,408,172
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	3,029,840,930	3,137,558,185
JUMLAH EKUITAS		3,029,840,930	3,137,558,185
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,040,763,811	3,167,966,357

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	25,844,000	4,525,000
JUMLAH PENDAPATAN		25,844,000	4,525,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,800,519,812	2,598,431,200
Beban Persediaan	D.3	49,773,104	96,857,510
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,007,976,663	1,182,887,075
Beban Pemeliharaan	D.5	528,574,450	561,565,406
Beban Perjalanan Dinas	D.6	30,147,700	411,441,174
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	144,641,958	386,640,604
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4,561,633,687	5,237,822,969
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4,535,789,687)	(5,233,297,969)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset			-
Pendapatan Pelepasan Aset		2,021,500	-
Beban Pelepasan Aset		(62,690,041)	-
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Pelepasan Aset		(60,668,541)	-
Non Lancar Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	6,793,253
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4,001,653)	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(4,001,653)	6,793,253
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(64,670,194)	6,793,253
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4,600,459,881)	(5,226,504,716)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR STASIUN KIPM JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	3,137,558,185	8,441,756,318
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4,600,459,881)	(5,226,504,716)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1,625,000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(1,625,000)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(1,625,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4,494,367,626	(77,693,417)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(107,717,255)	(5,304,198,133)
EKUITAS AKHIR	E.5	3,029,840,930	3,137,558,185

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Jambi

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Stasiun KIPM Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan .

PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Sersan UD Syawal-Paalmerah Jambi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Audited 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Jambi. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan sesuai dengan KEP-291/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Jambi, yaitu:

*Pendapatan
-LRA*

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2)Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ❖ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ❖ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ❖ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b.Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman KEPMEN Keuangan Nomor: 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. Secara umum tabel masa manfaat sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- (1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (2) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp27.865.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.865.500 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Jambi terdiri dari Pendapatan Jasa, pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025*

Uraian	Per 31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin			
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	1,800,000	27,865,500	
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	1,800,000	27,865,500	1,548.08

Pendapatan Jasa terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mulai Per 31 Desember 2025 senilai Rp27.865.500.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan	27,865,500	11,318,253	146.20
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah	27,865,500	11,318,253	146.20

*Realisasi Belanja
Negara
Rp4.500.970.612*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi Per 31 Desember 2025 Rp4.500.970.612 atau mencapai 95,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.695.437.000. Rincian anggaran

dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2025*

Uraian	per 31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,841,089,000	2,819,199,712	99.23
Belanja Barang	1,854,348,000	1,681,770,900	90.69
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,695,437,000	4,500,970,612	95.86

Realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebanyak 7,18% disebabkan adanya pengurangan anggaran belanja barang pada tahun 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025
dan 2024*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,819,199,712	2,579,751,300	9.28
Belanja Barang	1,681,770,900	2,269,409,936	(25.89)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,500,970,612	4,849,161,236	(7.18)

Belanja Pegawai
Rp2.819.199.712

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.819.199.712 dan Rp2.579.751.300. Realisasi belanja pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,28% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan jumlah pegawai PPPK ditahun 2025.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,082,711,016	1,204,774,759	(10.13)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,258,008,216	1,145,862,541	9.79
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	152,429,480		
Belanja Lembur	326,421,000	229,114,000	42.47
Jumlah Belanja Kotor	2,819,569,712	2,579,751,300	9.30
Pengembalian Belanja Pegawai	370,000		-
Jumlah Belanja	2,819,199,712	2,579,751,300	9.28

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.681.770.900

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.681.770.900 dan Rp2.269.409.936. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 25,89% dari tahun lalu. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja barang untuk Tahun Anggaran 2025.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja barang operasional	521,228,554	664,305,981	(21.54)
Belanja barang non operasional	17,100,000	60,659,700	(71.81)
Belanja jasa	470,453,500	459,225,925	2.44
Belanja pemeliharaan	528,574,450	561,470,406	(5.86)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	30,147,700	411,441,174	(92.67)
Belanja Barang Persediaan	114,266,696	112,306,750	1.75
Jumlah Belanja Kotor	1,681,770,900	2,269,409,936	(25.89)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1,681,770,900	2,269,409,936	(25.89)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp0

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tahun 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki anggaran untuk belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0.00
Belanja Modal Lainnya			0.00
Jumlah Belanja Kotor			#DIV/0!
Pengembalian			-
Jumlah Belanja			#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah			0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah			0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah			0.00
Tanah			0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			0.00
Jumlah Belanja Kotor			0.00
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja			0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun Anggaran 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan Mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin			0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan			0.00
Jumlah Belanja Kotor			0.00
Pengembalian			0.00
Jumlah Belanja			0.00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Perencanaan dan Pengawasan Gedung			0.00
perizinan Pembangunan Gedung dan Bangunan			0.00
Perjalanan Gedung dan Bangunan			0.00
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola			0.00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			0.00
Jumlah Belanja Kotor			0.00
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja			0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun Anggaran 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Air Baku			0.00
Jaringan Listrik			0.00
Jumlah Belanja Kotor			0.00
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja			0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tahun Anggaran 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki alokasi anggaran untuk belanja modal lainnya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Kuitansi	0	0
Jumlah	-	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Daftar PNPB disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Uang Tunai	0	0
Bank -	0	0
Jumlah	0	0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Keterangan	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Jumlah		

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0

Saldo Piutang PNB Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNB Per 31 Desember
2025 dan 2024*

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Piutang PNB		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR*
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

No	Nama	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1			
2			
3			
Jumlah			

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA*
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

No	Nama	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1			
2			
3			
Jumlah			

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Belanja Dibayar di Muka
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Jenis	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah		

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Jenis	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidik		
Jumlah		

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp112.368.114*

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp112.368.114 dan Rp30.613.661. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2023

Jenis	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Barang Konsumsi	2,605,600	30,569,661
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Bahan Baku	109,762,514	44,000
Jumlah	112,368,114	30,613,661

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian TP/TGR per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

No	Debitur	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
1			
2			
3			
Jumlah		NIHIL	

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Debitur	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.14 Tanah

Tanah
Rp18.000.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Jambi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp18.000.000 dan Rp18.000.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	18,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	0
Penghapusan aset aktif	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	18,000,000

Rincian saldo Tanah Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi kurang penghapusan dan Transfer Keluar

Rincian Tanah Per 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	900 m2	Jambi	18,000,000
Jumlah			18,000,000

*Peralatan dan
Mesin
Rp 5.598.496.657*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp5.598.496.657 dan Rp6.182.780.538. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6,182,780,538
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	642,896,321
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Masuk	491,150,000
Reklasifikasi Keluar	491,150,000
Penghentian dari penggunaan	(1,227,180,202)
Saldo per 31 Desember 2025	5,598,496,657
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5,377,430,415)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	221,066,242

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 berupa:

Mutasi Tambah:

- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya aktif sebesar Rp642.896.321
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp491.150.000

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi keluar sebesar Rp491.150.000
- Penghentian BMN dari penggunaan sebesar Rp1.227.180.202

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.137.524.432*

Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp3.137.524.432 dan Rp3.137.524.432.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3,137,524,432
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung dan Bangunan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan aset aktif	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	3,137,524,432
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	(503,631,193)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2,633,893,239

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi kurang penghapusan dan Transfer Keluar

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp 378.093.000*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp378.093.000 dan Rp387.293.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	387,293,000
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(9,200,000)
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	378,093,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(322,656,784)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	55,436,216

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Penghentiaan Aset dari penggunaan sebesar Rp9.200.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp19.850.000. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Per 31 Desember 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	19,850,000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan aset tetap lainnya	19,850,000
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp19.850.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Sampai dengan tanggal neraca Per 31 Desember 2025 tidak ada konstruksi dalam pengerjaan. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1				-	
2					
	Jumlah	-		-	

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp6.203.718.392*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp6.203.718.392 dan Rp6.608.095.274. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,598,496,657	5,377,430,415	221,066,242
2	Gedung dan Bangunan	3,137,524,432	503,631,193	2,633,893,239
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	378,093,000	322,656,784	55,436,216
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	9,114,114,089	6,203,718,392	2,910,395,697

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Per 31 Desember 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki Aset Tak berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

NIHIL

Mutasi Tambah:

Tidak ada mutasi tambah pembelian dan Transfer Masuk

Mutasi Kurang:

Tidak ada mutasi Kurang pada periode 31 Desember 2025

Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud
Per 31 Desember 2025*

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku

NIHIL

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0*

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2025 SKIPM Jambi Tidak Memiliki Aset lain – lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- reklasifikasi ke Aset Tetap	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

NIHIL

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp10.922.881*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.922.881 dan Rp30.408.172. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Stasiun KIPM Jambi Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025*

No	Uraian	Jumlah
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	10,922,881
Total	-	10,922,881

Utang kepada pihak ketiga yaitu Belanja barang yang masih harus dibayar yaitu Beban listrik dan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp10.922.881.

Utang yang
Belum
ditagihkan
Rp0

C.26 Utang Yang Belum ditagihkan

Nilai Utang yang Belum ditagihkan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2025 tidak ada utang yang belum ditagihkan.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Per 31 Desember 2025 SKIPM Jambi tidak memiliki Pendapatan Diterima di Muka.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp10.922.881

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.922.881 dan Rp30.408.172. Beban yang masih harus dibayar bulan Desember Tahun 2025 berupa beban langganan telepon sebesar Rp2.908.095 dan beban langganan listrik sebesar Rp8.014.786, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Beban Keperluan perkantoran	-	2,955,495
Beban langganan telepon	2,908,095	
Beban Langganan listrik	8,014,786	8,772,777
Beban Pegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	18,679,900
Jumlah	10,922,881	30,408,172

Ekuitas
Rp
3.029.840.930

C.29 Ekuitas

Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.029.840.930 dan Rp3.137.558.185.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp27.865.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp27.865.500 dan Rp4.455.000, adanya peningkatan PNB dibandingkan Tahun 2024 yang disebabkan oleh bertambahnya permintaan pelayanan pengujian di laboratorium SKIPM Jambi. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	25,844,000	4,455,000	480
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2,021,500	0	
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	0	0
Jumlah	27,865,500	4,455,000	525

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.819.199.712

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.819.199.712 dan Rp2.598.431.200. Perbedaan Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp18.679.900 disebabkan adanya Belanja pegawai yang harus dibayar berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2024 kepada 4 pegawai.

*Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	785,852,840	846,200,600	(7)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11,795	12,950	(9)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	(86)	
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,733,310	56,047,330	(11)
Beban Tunj. Anak PNS	17,868,930	20,169,798	(11)
Beban Tunj. Struktural PNS	12,600,000	14,400,000	(13)
Beban Tunj. Fungsional PNS	23,220,000	25,585,000	(9)
Beban Tunj. PPh PNS	5,037,781	4,601,965	9
Beban Tunj. Beras PNS	40,410,360	46,059,120	(12)
Beban Uang Makan PNS	123,171,000	113,277,000	9
Beban Tunjangan Umum PNS	24,435,000	23,655,000	3
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	(185,328)	
Beban Gaji Pokok PPPK	103,820,800	38,443,200	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,134	906	
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,667,550	3,844,320	
Beban Tunjangan Anak PPPK	2,076,416	768,864	
Beban Tunjangan Beras PPPK	7,169,580	2,607,120	
Beban Uang Makan PPPK	24,278,000	7,067,000	
Beban Tunjangan Umum PPPK	6,415,000	2,220,000	
Beban Lembur	326,421,000	229,114,000	42
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1,258,008,216	1,164,542,441	8
Jumlah	2,819,199,712	2,598,431,200	8

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.773.104 dan Rp96.857.510. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	49,729,104	82,927,710	(40)
Beban Persediaan Bahan Baku	44,000	13,929,800	(100)
Beban persediaan lainnya			
Jumlah	49,773,104	96,857,510	(49)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp
1.007.976.663*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.007.976.663 dan Rp1.182.887.075. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	333,500,525	474,433,494	(29.71)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19,769,534	37,088,282	(46.70)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38,000	410,000	(90.73)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84,000,000	60,488,000	38.87
Beban Barang Operasional Lainnya	80,965,000	91,851,800	(11.85)
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Bahan	13,020,000	47,143,150	(72.38)
Beban Honor Output Kegiatan	4,080,000	4,896,000	(16.67)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	8,620,550	
Beban Langganan Listrik	101,078,919	137,122,799	(26.29)
Beban Langganan Telepon	3,817,185		
Beban Langganan Daya dan Jasa			
Beban Sewa	27,500,000	29,100,000	(5.50)
Beban Jasa Profesi	1,800,000	3,600,000	(50.00)
Beban Jasa Lainnya	338,407,500	288,133,000	17.45
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid - 19			
Beban Aset Estrakomtabel Peralatan dan Mesin			
Jumlah	1,007,976,663	1,182,887,075	(14.79)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp528.574.450*

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp528.574.450 dan Rp561.565.406. Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400,663,000	295,803,450	35.45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127,911,450	265,666,956	(51.85)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	-	95,000	
Jumlah	528,574,450	561,565,406	(5.87)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp30.147.700*

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp30.147.700 dan Rp411.441.174. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Beban Perjalanan Biasa	29,672,700	382,126,174	(92.23)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	475,000	26,315,000	(98.19)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		3,000,000	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			#DIV/0!
Jumlah	30,147,700	411,441,174	(92.67)

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah			

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian

Beban Bantuan Sosial untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah			

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
144.641.958*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp144.641.958 dan Rp231.761.735. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100,644,874	166,563,177
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35,595,997	62,934,601
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1,167,462	2,263,957
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Penyusutan	137,408,333	231,761,735
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	7,233,625	
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	144,641,958	231,761,735

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah	NIHIL		

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(64.670.194)

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan	0	0	0.00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	2,021,500		0.00
Beban kerugian pelepasan aset	(62,690,041)		0.00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(60,668,541)	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,793,253	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,001,653)	0	0.00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4,001,653)	6,793,253	0.00
Defisit Selisih Kurs			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(64,670,194)	6,793,253	0.00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp
3.137.558.185*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.137.558.185 dan Rp8.441.756.318.

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp4.600.459.881*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.600.459.881 dan Rp5.226.504.716. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Per 31 Desember 2025*

Jenis Persediaan	Koreksi
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	NIHIL
Barang Konsumsi	
Suku Cadang	
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp(1.625.000)*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(1.625.000) dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Per 31 Desember 2025*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	NIHIL
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain
Per 31 Desember 2025*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Kewajiban	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp4.494.367.626*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.494.367.626 dan Rp(77.693.417). Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2025*

Transaksi Antar Entitas	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Diterima dari Entitas Lain	-27,865,500	-11,318,253
Ditagikan ke Entitas Lain	4,500,970,612	4,849,161,236
Transfer Masuk	Rp 21,262,514	Rp 50,320,000
Transfer Keluar	Rp -	Rp (4,965,856,400)
Pengesahan Hibah Langsung		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		
Jumlah	4,494,367,626	(77,693,417)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(27.865.500) sedangkan DKEL sebesar Rp4.500.970.612.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan

BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.262.514 terdiri dari:

No	TGLBUKU	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	31 Desember 2025	Bahan Lab	BUSKIPM	21,262,514
				21,262,514

Per 31 Desember 2025 SKIPM Jambi tidak ada transfer keluar

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1			
2		NIHIL	
3			
	Jumlah		-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah Rp0.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp3.029.840.930

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.029.840.930 dan Rp3.137.558.185.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal Neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional (PN) TA 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp345.552.000 dan realisasi Rp207.819.600 atau 60,14 %, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SATKER	PROGRAM PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN RINCIAN OUTPUT	%
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	27.270.000	5.060.00	18,56%	Produk	2	2	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	80.000.000	8.010.000	10,01%	Lembaga	8	8	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25.000.000	0	0%	Produk	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	10.000.000	0	0%	Lembaga	2	2	100

Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	142.482.000	142.449.600	99,98%	Rekomendasi/kebijakan	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	25.000.000	100%	Lembaga	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	27.300.000	27.300.000	100%	Lembaga	1	1	100
Stasiun Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulas	8.500.000	0	0%	Produk	1	1	100

F.2.2 Capaian Output Strategis TA 2024

Capaian Output merupakan satu satu indikator di dalam aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada IKPA. Indikator Capaian Output mengukur sejauh apa progress dan realisasi dari kinerja yang sudah dilaksanakan. Selama periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh SKIPM Jambi terdiri dari 14 kegiatan yaitu 8 RO untuk kegiatan Prioritas Nasional dan 6 RO kegiatan Non Prioritas Nasional. Capaian Output SKIPM Jambi dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	URAIAN RINCIAN OUTPUT	PN / TEMATIK	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	PERSENTASE PENYERAPAN	TARGET KELUARAN	REALISASI VOLUME KELUARAN	PROGRES CAPAIAN OUPUT
1	PDC002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidas	PN	27.270.000	5.060.00	18,56%	2	2	100
2	PDF002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang diva	PN	80.000.000	8.010.000	10,01%	8	8	100
3	QIA001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	PN	25.000.000	0	0%	1	1	100

4	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PN	10.000.000	0	0%	2	2	100
5	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	NON PN	5.000.000	0	0%	1	1	100
6	DCC001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	NON PN	8.500.000	0	0%	1	1	100
7	PBR001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	PN	142.482.000	142.449.600	99,98%	1	1	100
8	PDD001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	PN	25.000.000	25.000.000	100%	1	1	100
9	PDD002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	PN	27.300.000	27.300.000	100%	1	1	100
10	QIA001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regula	PN	8.500.000	0	0%	1	1	100
11	EBA962	Layanan Umum	NON PN	5.104.000	5.103.300	99,99%	1	1	100
12	EBA994	Layanan Perkantoran	NON PN	4.297.405.000	4.275.094.912	99,48%	1	1	100
13	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	NON PN	13.324.000	13.322.800	99,99%	1	1	100
14	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	NON PN	20.552.000	0	0%	1	1	100

F.2.3 Utang pada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.922.881 berupa Belanja barang yang masih harus dibayar yaitu Beban listrik bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp8.014.786 dan telepon bulan Desember Tahun 2025 sebesar Rp 2.908.095.

F.2.4 Transfer Masuk

Per 31 Desember 2025 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp21.262.514 dari BUSKIPM yaitu berupa bahan laboratorium.

F.2.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Per 31 Desember 2025 terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp(1.625.000). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (649636) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

Tgl Data : 02/05/26 7:29 PM

Tgl Cetak : 02/05/26 9:54 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	112,368,114	30,613,661	81,754,453	267.05
JUMLAH ASET LANCAR	112,368,114	30,613,661	81,754,453	267.05
ASET TETAP				
Tanah	18,000,000	18,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,598,496,657	6,182,780,538	(584,283,881)	(9.45)
Gedung dan Bangunan	3,137,524,432	3,137,524,432	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	378,093,000	387,293,000	(9,200,000)	(2.38)
Aset Tetap Lainnya	0	19,850,000	(19,850,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,297,518,543)	(6,608,095,274)	310,576,731	(4.70)
JUMLAH ASET TETAP	2,834,595,546	3,137,352,696	(302,757,150)	(9.65)
JUMLAH ASET	2,946,963,660	3,167,966,357	(221,002,697)	(6.98)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	10,922,881	30,408,172	(19,485,291)	(64.08)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,922,881	30,408,172	(19,485,291)	(64.08)
JUMLAH KEWAJIBAN	10,922,881	30,408,172	(19,485,291)	(64.08)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,936,040,779	3,137,558,185	(201,517,406)	(6.42)
JUMLAH EKUITAS	2,936,040,779	3,137,558,185	(201,517,406)	(6.42)
JUMLAH EKUITAS	2,936,040,779	3,137,558,185	(201,517,406)	(6.42)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,946,963,660	3,167,966,357	(221,002,697)	(6.98)

Keterangan :

FINAL

JAMBI, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PIYAN GUSTAFFIANA
NIP 197808242005021001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032

ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13

SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI 649636

Tgl Data : 02/05/26 7:29 PM

Tgl Cetak : 02/05/26 9:53 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,800,000	27,865,500	26,065,500	1548	54,455,000	11,318,253	43,136,747	21
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,800,000	27,865,500	26,065,500	1548	54,455,000	11,318,253	43,136,747	21
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,800,000	27,865,500	26,065,500	1548	54,455,000	11,318,253	43,136,747	21
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,695,437,000	4,500,970,612	(194,466,388)	96	4,919,413,000	4,849,161,236	70,251,764	99
1. Belanja Pegawai	2,841,089,000	2,819,199,712	(21,889,288)	99	2,583,106,000	2,579,751,300	3,354,700	100
2. Belanja Barang	1,854,348,000	1,681,770,900	(172,577,100)	91	2,336,307,000	2,269,409,936	66,897,064	97
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI 649636

Tgl Data : 02/05/26 7:29 PM
Tgl Cetak : 02/05/26 9:53 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,695,437,000	4,500,970,612	(194,466,388)	96	4,919,413,000	4,849,161,236	70,251,764	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAMBI, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PIYAN GUSTAFFIANA
NIP 197808242005021001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (649636) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

Tgl Data : 02/05/26 7:29 PM
Tgl Cetak : 02/05/26 9:53 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,844,000	4,525,000	21,319,000	471.138
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,844,000	4,525,000	21,319,000	471.138
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,844,000	4,525,000	21,319,000	471.138
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,800,519,812	2,598,431,200	202,088,612	7.777
Beban Persediaan	49,773,104	96,857,510	(47,084,406)	(48.612)
Beban Barang dan Jasa	1,007,976,663	1,182,887,075	(174,910,412)	(14.787)
Beban Pemeliharaan	528,574,450	561,565,406	(32,990,956)	(5.875)
Beban Perjalanan Dinas	30,147,700	411,441,174	(381,293,474)	(92.673)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI
SATUAN KERJA : (649636) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

Tgl Data : 02/05/26 7:29 PM

Tgl Cetak : 02/05/26 9:53 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	238,442,109	386,640,604	(148,198,495)	(38.33)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,655,433,838	5,237,822,969	(582,389,131)	(11.119)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,629,589,838)	(5,233,297,969)	603,708,131	(11.536)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(60,668,541)	0	(60,668,541)	()
Pendapatan Pelepasan Aset	2,021,500	0	2,021,500	
Beban Pelepasan Aset	62,690,041	0	62,690,041	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(4,001,653)	6,793,253	(10,794,906)	(158.906)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,793,253	(6,793,253)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,001,653	0	4,001,653	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(64,670,194)	6,793,253	(71,463,447)	(1,051.977)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,694,260,032)	(5,226,504,716)	532,244,684	(10.184)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,694,260,032)	(5,226,504,716)	532,244,684	(10.184)

Keterangan :
FINAL

JAMBI, 2 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

PIYAN GUSTAFFIANA
NIP 197808242005021001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (649636) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

Tgl Data : 02/05/26 6:36 PM

Tgl Cetak : 02/05/26 9:54 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,137,558,185	8,441,756,318	(5,304,198,133)	(62.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,694,260,032)	(5,226,504,716)	532,244,684	(10.18)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,625,000)	0	(1,625,000)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,625,000)	0	(1,625,000)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,494,367,626	(77,693,417)	4,572,061,043	(5,884.7 5)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(201,517,406)	(5,304,198,133)	5,102,680,727	(96.2)
EKUITAS AKHIR	2,936,040,779	3,137,558,185	(201,517,406)	(6.42)

Keterangan :

FINAL

JAMBI, 2 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KPAPIYAN GUSTAFFIANA
NIP 197808242005021001